

KERANGKA ACUAN KEGIATAN APBD T.A. 2024
KEGIATAN PENYUSUNAN POLICY BRIEF
OPTIMALISASI *LINK AND MATCH* SMK PADA SEKTOR PARIWISATA DAN UMKM
EKONOMI KREATIF

SKPD	: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
UNIT KERJA	: Biro Kesejahteraan Rakyat
SUB UNIT KERJA	: Bagian Pendidikan, Kesehatan, Sosial
SUB SUB UNIT KERJA	: Sub Bagian Pendidikan
PROGRAM	: Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pendidikan
KEGIATAN	: Kegiatan Penyusunan Analisis Kebijakan Dengan Judul Optimalisasi Link And Match SMK Pada Sektor Pariwisata Dan UMKM Ekonomi Kreatif

A. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018, Biro Kesejahteraan Rakyat memiliki tugas untuk melaksanakan pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan analisis kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat, yang memiliki fungsi salah satunya untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat urusan Pelayanan Dasar dan Non-Pelayanan Dasar. Secara khusus, bidang yang diampu meliputi 1) Keagamaan, 2) Pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, 3) Pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga. Kedepannya, mendasar Permendagri Nomor 90 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, terjadi perubahan komponen bidang ampunan Biro Kesra berdasarkan urusannya, yaitu Keagamaan, Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial) dan Non-Pelayanan Dasar (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan).

Sekolah Menengah Kejuruan (selanjutnya disebut SMK) sebagai satuan jenjang pendidikan formal yang berperan dalam menumbuhkembangkan sumber daya manusia (SDM) melalui pengembangan dibidang vokasional di Indonesia. Dalam orientasinya diwujudkan tidak hanya melalui pendidikan sebagaimana adanya dalam satuan jenjang lain, melainkan juga pelatihan berupa pengajaran ketrampilan dan wawasan pengetahuan untuk peserta didik sehingga layak diaplikasikan dalam dunia pekerjaan. Layaknya sebagai lembaga pendidikan kejuruan maka SMK turut andil membantu adanya pembangunan sektor ekonomi bangsa dengan cara mempersiapkan *outcome*

pendidikan agar dapat terjun praktek menjadi tenaga kerja tingkat menengah . Hal tersebut berlandaskan pada undang undang yang sejak awal mendukung keberadaan pendidikan formal SMK bahwa satuan jenjang tersebut membekali peserta didik kemampuan kemampuan bekerja diarah dan bagian tertentu (UU SPN Nomor 20 pasal 3 dalam pasal 15 tahun 2003). Arah satuan jenjang ini berarti sebagai lembaga yang mampu membuat peserta didik mendalami satu skill agar dapat terjun langsung ke dalam dunia industri (Perkins, 1998). Maka benar jika dikatakan bahwa tujuan pendidikan kejuruan salah satunya menjadi wadah penyalur tenaga kerja yang cakap, mahir, dan mempunyai kompetensi terbaik (Azman et al ; 2020).

Dalam praktek pelaksanaan SMK justru terjadi kontradiktif dengan pernyataan diatas. Realitanya bahwa banyak dunia kerja belum menampung banyak peserta didik lulusan SMK sehingga tidak sedikit jumlah lulusan SMK yang menjadi pengangguran dan sesuai dengan laporan BPS bahwa jumlah pengangguran tertinggi adalah SMK (Badan Pusat Statistik, 2022). Hal tersebut terjadi diantaranya karena persyaratan kriteria yang diperlukan oleh pihak dunia kerja belum mampu dipenuhi lulusan SMK. Sebaliknya, jika ada peserta didik lulusan SMK yang bekerja, itu cenderung berbeda dengan arah kompetensi yang dimiliki. Pihak perusahaan yang menerima dan memilih lulusan SMK sekalipun ternyata memposisikan mereka secara luas berbeda dengan jurusannya, seperti menjadi menjaga toko, keamanan perumahan, dan posisi lainnya yang tidak sejalan dengan kompetensinya. Fenomena ini seharusnya tidak terjadi mengingat peran dan tujuan terbentuknya lembaga jenjang SMK yang menekankan pada persiapan memasuki dunia kerja. Terkait ini maka dapat disimpulkan bahwa SMK sebagai satuan lembaga pendidikan perlu mengoptimalkan perannya agar peserta didik lebih kompeten dan sesuai harapan dunia pekerjaan atau secara singkat terjadi ketidaksesuaian antara SMK dengan kebutuhan dunia pekerjaan atau yang sering diberi istilah dengan *missmatch*.

Istilah *Link and Match* bukanlah suatu istilah asing bagi dunia pendidikan, terutama SMK. Istilah ini sebenarnya sudah lama dikenal, namun sejak diluncurkan Inpres no 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK, *Link and match* menjadi item penting yang harus menjadi perhatian penuh oleh kalangan SMK.

Konsep kebijakan *Link and Match* antara dunia pelatihan dan dunia kerja akan menurunkan jumlah pengangguran lulusan SMK atau pun lainnya, yang semakin hari semakin meningkat. Kebijakan ini dapat disesuaikan dengan dunia pelatihan

dimana saat ini dituntut agar alumni yang dihasilkan lembaga pelatihan dapat diserap oleh dunia usaha atau dunia industri. Idealnya, ada tiga komponen yang harus bersinergi untuk menyukseskan program *Link and Match* lembaga pelatihan, dunia kerja (perusahaan) dan pemerintah. Jika *Link and Match* berjalan dengan baik, pemerintah juga akan mendapat manfaat dari pengurangan beban pengangguran (yang sudah terbentuk) terutama alumni SMK (data TPT tahun 2022).

Oleh karena itu, pemerintah perlu secara serius menjaga keterkaitan dan mekanisme antara lembaga pelatihan dan dunia kerja agar program *Link and Match* dapat berjalan lebih baik dan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Manfaat yang dapat dipetik sangat besar, karena itu, diharapkan semua *stake* dan *shareholder* dunia pelatihan bersedia membuka diri dan mulai bersungguh-sungguh menjalankannya. Pelatihan kejuruan harus lapang dada menerima bidang keahlian (kompetensi) yang dibutuhkan dunia kerja sebagai materi pembelajaran. Perusahaan juga harus membuka pintu selebar-lebarnya bagi lulusan pelatihan kejuruan yang ingin magang (bekerja) di perusahaan tersebut. Sedangkan Pemerintah harus serius dan tidak semata memandang program *Link and Match* (keterkaitan dan kesepadanan) sebagai proyek belaka yang berupa seremonial semata.

Pada Februari 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Tengah sebesar 5,75%, menurun sebesar 0,21% dibanding Februari 2021 yaitu 5,59%. Tingkat Pengangguran dari tamatan SMK pada Februari 2022 masih menjadi yang paling tinggi/dominan dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 10,73%.

Keterangan	Tahun		
	2021	2022	2023
TPT	5,95%	5,57%	5,13%
TPT Menurut Pendidikan Tahun 2021			
SD	3,99%	3,7%	3,47%
SMP	5,38%	6,87%	5,59%
SMA	6,26%	7,32%	9,19%
SMK	12,36%	10,00%	10,73%
Diploma	4,91%	5,66%	5,63%

Universitas	7,04%	5,62%	5,75%
-------------	-------	-------	-------

Sumber : BPS Jateng 2022

Masih tingginya tingkat pengangguran dari jenjang lulusan SMK tersebut salah satunya diakibatkan masih terjadinya *missmatch* antara kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan tenaga kerja yang tersedia. Rata-rata industri besar tidak bisa menyerap lulusan SMK dengan alasan kompetensi lulusan yang mereka tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Akan tetapi disatu sisi kemitraan dengan industri besar tetap harus diupayakan untuk memastikan peserta didik memiliki pengalaman bekerja di industri, akan tetapi untuk tidak harus memaksakan kemitraan yang dibangun harus lengkap. Sekolah harus jeli untuk melihat apa yang sekiranya bisa dikerjakan bersama dengan industri besar tersebut, misalnya kerja sama PKL (praktik kerja lapangan) selama tiga bulan, bukan enam bulan, sehingga anak-anak kita tetap dapat pengalaman langsung di industri yang nantinya akan membentuk pengalaman mereka, baik *hard skills* dan *soft skills*,"

Selain itu permasalahan yang kita hadapi dalam optimalisasi *link and match* ini adalah keterbatasan industri besar di daerah kerap menjadi hambatan bagi SMK untuk mewujudkan kemitraan yang *link and match* dengan dunia industri. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan paradigma dimana sekolah tidak hanya berpatokan pada industri besar untuk bermitra, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang saat ini mengalami kemajuan yang pesat mulai harus dilirik dengan memanfaatkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk bekerja sama. Kerja sama yang dijalin antara SMK dengan UMKM disesuaikan dengan kompetensi

keahlian yang ada di masing-masing sekolah tersebut sehingga kemitraan yang terbangun tetap bisa selaras antara kompetensi yang diajarkan dengan kebutuhan UMKM itu sendiri. Pada sektor pariwisata diharapkan dapat bekerjasama dengan perhotelan dan destinasi wisata untuk dapat mendisplay produk yang dihasilkan, begitu halnya pada event-event nasional maupun internasional diharapkan SMK dapat mengambil peran untuk mempromosikan hasil karyanya. Diharapkan dengan adanya promosi dan kerjasama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini dapat memacu para lulusan SMK dan mengubah mindset mereka dimana lulusan SMK tidak hanya bekerja dibidang industri besar melainkan berdikari dengan membuka lapangan kerja sendiri dengan kompetensi yang unggul hasil dari pelatihan pembelajaran mereka di sekolah.

Dengan begitu kebijakan *link and match* ini dapat berkontribusi pada penurunan pengangguran di Jawa Tengah, dalam **mendukung 10 program prioritas Pj. Gubernur Jawa Tengah dimana program ke 6 disebutkan Peningkatan Kualitas Sistem Pendidikan Vokasi.**

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan.
5. Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
6. Permendikbud Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum SMK.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pelaksanaan Kegiatan Optimalisasi SMK ini adalah memberikan kesempatan kepada siswa SMK untuk mengoptimalkan kompetensi yang diperoleh di satuan Pendidikan sehingga bisa menghasilkan produk yang berdaya saing untuk dipasarkan baik di kancah nasional maupun internasional dengan cara bekerjasama dengan sektor pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM.

Tujuan :

1. Merubah paradigma *link and match* bahwa lulusan SMK tidak harus bekerja di sektor industri besar, melainkan dapat bekerjasama dengan pariwisata , UMKM dan ekonomi kreatif, diharapkan lulusan SMK ini dapat menciptakan wirausaha dan menyerap tenaga kerja.
2. Sebagai salah satu upaya dalam mengatasi pengangguran.

Langkah-langkah dalam optimalisasi *link and match* :

1. Membangun kerja sama dengan sektor usaha menengah kecil: Sekolah vokasi harus menjalin kemitraan aktif dengan sektor usaha menengah kecil. Hal ini dapat dilakukan melalui program magang, kerja praktik, atau kolaborasi dalam pengembangan kurikulum. Dengan demikian, siswa akan memiliki kesempatan untuk belajar secara langsung di lingkungan kerja sektor usaha menengah kecil dan mengembangkan keterampilan yang relevan.
2. Pemberian pelatihan kewirausahaan: Seiring dengan penguasaan keterampilan teknis, sekolah vokasi juga harus memberikan pelatihan kewirausahaan kepada siswa. Pelatihan ini dapat membantu siswa dalam mengembangkan jiwa wirausaha dan membekali mereka dengan pengetahuan tentang pengelolaan usaha kecil dan menengah.
3. Pembentukan jejaring dan komunitas alumni: Sekolah vokasi dapat membentuk jejaring dan komunitas alumni yang aktif. Jejaring ini dapat memberikan manfaat dalam hal pengembangan karier dan pertukaran informasi tentang peluang kerja di sektor usaha menengah kecil. Sekolah vokasi juga dapat memanfaatkan alumni yang telah sukses di sektor tersebut sebagai mentor bagi siswa yang sedang belajar di sekolah.
4. Penguatan pendampingan dan bimbingan karier: Sekolah vokasi perlu menyediakan pendampingan dan bimbingan karier yang baik kepada siswa. Ini termasuk memberikan informasi tentang peluang kerja di sektor usaha menengah kecil, membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan mencari kerja, dan memberikan arahan tentang pengembangan karier jangka panjang di sektor tersebut.
5. Pelibatan Pemerintah dalam fasilitasi Satuan Pendidikan untuk memamerkan produk mereka disektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN

OPD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Biro Perekonomian Setda Prov. Jateng												
2. Rapat Koordinasi												
3. Pemantauan dan evaluasi serta konsultasi pelaksanaan kebijakan												

G. KELUARAN & HASIL KEGIATAN

Program/Kegiatan	Keluaran		Hasil	
	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target
1. Melakukan rapat pendahuluan/ awal dengan OPD	Diperoleh bentuk sinergitas antara SMK dan sektor pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif	Tersedianya kebutuhan data/kajian yang akan diintervensi untuk disinergikan antara sektor SMK dan OPD terkait	Tersusun data SMK penyelenggara pendidikan vokasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	Dokumen Perumusan Masalah/Draft Kajian/Telaahan
2. Melakukan Rapat Teknis dan Rapat Koordinasi dengan OPD, akademisi dan unsur terkait	Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Koperasi	Tersusunnya Draft Awal Telaahan Optimalisasi Link And Match Pada Dunia pariwisata dan ekonomi	Finalisasi Konsep rumusan kebijakan Optimalisasi Link And Match Pada Dunia pariwisata dan	Tersusunnya draft final Optimalisasi Link And Match Pada Dunia pariwisata dan ekonomi kreatif.

Program/Kegiatan	Keluaran		Hasil	
	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target
	Dan UKM, Dinas Pora Dan Pariwisata, Dinas PTSMP dan Biro Perekonomian Setda Prov. Jateng	kreatif	ekonomi kreatif	
3. Pemantauan dan evaluasi serta konsultasi kebijakan		Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan		Tersedianya data dan masukan dari Kab/Kota (SMK) yang akan disinergikan dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif

H. USULAN PAGU INDIKATIF

Usulan pagu indikatif kegiatan sebesar Rp. 250.000.000 ,- dengan rincian sebagaimana terlampir pada RKA.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan T.A. 2024.

a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.

**Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda
Provinsi Jawa Tengah**


(TEGOCH RADI NOEGROHO,SH)
NIP.19710630 199203 1 004